

LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponororogo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Perbaikan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan strategis yang disusun, pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem pengukuran kinerja dan dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Paradigma baru yang menekankan kepada *good governance* telah diupayakan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan dimaksud. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dijadikan modal dasar dalam setiap kegiatan. Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban juga diharapkan dapat menjadi informasi bagi berbagai pihak yang terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Ponorogo


Dra. Besse Teorisampeang, M.Si.
Paripurna KOT (IV/b)
NIP 196805121990092002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
Struktur Organisasi	2
Tugas dan Fungsi	3
Isu Strategis	3
Keadaan Pegawai	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis SKPD	5
1. Visi	5
2. Misi	7
3. Tujuan	7
4. Sasaran	7
5. Indikator Kinerja	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	11
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2024	11
2.1. Capaian Sasaran	11
B. Realisasi Anggaran	16
BAB IV PENUTUP	19
A. Kesimpulan	19
B. Saran	19
LAMPIRAN:	
a. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
b. Matriks Renstra	
c. Reviu Perjanjian Kinerja tahun yang dilaporkan	
d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun yang dilaporkan	
e. Pengukuran Kinerja Tahunan tahun yang dilaporkan	
f. Penghargaan yang diperoleh selama tahun yang dilaporkan	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran : 1. Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat.

Dengan indikator :

1. Jumlah kriminalitas.

Realisasi Jumlah kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ponorogo berdasarkan data dari POLRES Ponorogo Tahun 2024 adalah 211 Kasus.

2. Prosentase potensi konflik yang dapat diredam.

Realisasi prosentase konflik yang dapat diredam pada Tahun 2024 adalah 100 % dari yang ditargetkan sebelumnya adalah 100 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dimasa yang akan datang.

Dalam rangka ikut berperan serta serta dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif, maka yang di pandang perlu dilaksanakan oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat.

Sebagai upaya untuk menciptakan situasi sebagaimana yang diharapkan maka upaya yang ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan deteksi dini dan cegah dini melalui Sosialisasai, pembinaan, pemantauan terhadap masyarakat maupun situasi wilayah.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) ini dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja.

Selain itu juga berfungsi sebagai wujud dari pertanggung jawaban atas tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo ;
2. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat ;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan Program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Ponorogo terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan administrasi badan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan masalah yang saling berhubungan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Secara umum permasalahan yang masih dihadapi antara lain :

- 1.1 Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan;
- 1.2 Peningkatan rasa aman, stabilitas keamanan untuk menumbuh kembangkan persatuan dan kesatuan;
- 1.3 Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
- 1.4 Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan koordinasi dan komunikasi yang harmonis agar tugas pokok dan fungsinya dapat tercapai dengan optimal.

1.4 KEADAAN PEGAWAI

Jumlah pegawai seluruhnya 28 Orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan tingkat pendidikan.
 - a. Strata 2 : 6 Orang.
 - b. Strata 1 / D4 : 10 Orang
 - c. Diploma : 2 Orang

d. SMA	:	10 Orang
e. SMP	:	- Orang
<hr/>		
Jumlah	:	28 Orang

2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan.

a. Golongan IV	:	7 Orang
b. Golongan III	:	10 Orang
c. Golongan II	:	9 Orang
d. Golongan I	:	- Orang
e. Honorer / Non PNS	:	2 Orang
<hr/>		
Jumlah	:	28 Orang

3. Berdasarkan Jabatan Struktural.

a. Eselon II	:	1 Orang
b. Eselon III	:	4 Orang
c. Eselon IV	:	7 Orang
d. Staf	:	16 Orang
<hr/>		
Jumlah	:	28 Orang

4. Berdasarkan Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan

a. Jabatan Fungsional	:	6 Orang
<hr/>		
Jumlah	:	6 Orang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS SKPD

1. VISI

Dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021-2026 adalah dokumen jangka menengah Kabupaten Ponorogo yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026. RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021-2026 pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Kabupaten Ponorogo dikembangkan, apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Perencanaan strategis yang disusun berisi tujuan sasaran pembangunan Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat konsisten dengan visi, misi program kepala daerah terpilih, dalam kerangka waktu yang sesuai kemampuan daerah untuk mengimplementasikannya, sehingga dapat dikembangkan kesepakatan dengan seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif untuk memadukan semua sumber daya (termasuk swasta) dalam mencapai tujuan, demi menghasilkan pembangunan Kabupaten Ponorogo yang lebih produktif, efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

"Menuju Kabupaten Ponorogo HEBAT"

Visi RPJMD Kabupaten Ponorogo ini selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Parsipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong". Keselarasan antara RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Ponorogo karena mengarah pada tujuan

yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur (dibaca "sebagai masyarakat sejahtera") sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan reformulasi *Nawa Darma Nyata* Bupati dan Wakil Bupati terpilih, *Nawa Darma Nyata* terdiri dari:

1. Meningkatkan Produktivitas Petani melalui Reformasi Sistem Pertanian;
2. Mencetak Generasi Penerus yang Unggul, Kreatif, Kritis Mandiri, Berkepribadian, Beriman, Berakhlak Mulia dan Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional;
4. Mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi Budaya Asli Ponorogo yang berpusat pada Kesenian Reyog;
5. Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Manusia
6. Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Nasional;
7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki Era Ekonomi Digital;
8. Memberdayakan dan menguatkan Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan koperasi; dan
9. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Efektif, Transparan, Bermartabat, Melindungi, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.

Reformulasi *Nawa Darma Nyata* menjadi 4 (empat) misi yang ditetapkan sebagai berikut:

2. MISI

1. Meningkatkan perekonomian Daerah berbasis pertanian dan pariwisata.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas dan responsif.

3. TUJUAN

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Misi 4, "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas, dan responsif".

Dari misi dalam RPJMD diatas maka dapat dituangkan menjadi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

"Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan situasi lingkungan daerah yang kondusif"

4. SASARAN

Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik.

5. INDIKATOR KINERJA

Indikator merupakan alat untuk mengukur kinerja atau pencapaian suatu organisasi. Penetapan Indikator kinerja mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, yaitu:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama dan Target 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
1.	Jumlah kriminalitas	Kasus	260 Kasus
2.	Prosentase potensi konflik yang dapat diredam	%	100 %
3.	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu		
	• Pilpres	%	70%
	• Pileg DPD	%	70%
	• Pileg DPR RI	%	70%
	• Pileg DPRD Provinsi	%	70%
	• Pileg DPRD Kabupaten	%	70%
4.	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pilkada	%	70%
	• Pilgub	%	70%
	• Pilbup	%	70%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja (LKj) Dokumen Perjanjian Kinerja

(PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2024 setelah ada reviu yang mengacu pada RPJMD, Renstra serta Renja baru.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran demi mewujudkan tujuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan beberapa indikator kinerja yaitu :

Tabel 2.2
Reviu Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Jumlah kriminalitas	260 Kasus
		Prosentase potensi konflik yang dapat diredam.	100 %
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pilpres • Pileg DPD • Pileg DPR RI • Pileg DPRD Provinsi • Pileg DPRD Kabupaten 	<p>70%</p> <p>70%</p> <p>70%</p> <p>70%</p> <p>70%</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pilkada <ul style="list-style-type: none"> • Pilgub • Pilbup 	70% 70%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 merupakan jembatan untuk mewujudkan target kinerja yang telah dilaporkan pada awal tahun anggaran berikutnya. Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pencapaian sasaran tersebut meliputi capaian kinerja dan anggaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai berhasil atau tidaknya program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Capaian Kinerja mencakup penilaian indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan standar pencapaian dengan skala ordinal. Skala Ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan.

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
3	75 % sampai dengan 100 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1
Pencapaian Perjanjian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Jumlah kriminalitas	260 Kasus	211 Kasus	119%	
		Prosentase potensi konflik yang dapat diredam	100%	100%	100%	
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu				
		• Pilpres	70%	82,93%	118,5%	
		• Pileg DPD	70%	82,47%	117,8%	
		• Pileg DPR RI	70%	82,33%	117,6%	
		• Pileg DPRD Provinsi	70%	82,33%	117,6%	
• Pileg DPRD Kabupaten	70%	82,26%	117,5%			
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pilkada				
		• Pilgub	70%	75,51%	107,8%	
		• Pilbup	70%	75,41%	107,7%	

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

2.1. Capaian Sasaran : Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat diukur dengan 4 indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Jumlah kriminalitas	260 Kasus	211 Kasus	119%
		Prosentase potensi konflik yang dapat diredam	100%	100%	100%
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu			
		• Pilpres	70%	82,93%	118,5%
		• Pileg DPD	70%	82,47%	117,8%
		• Pileg DPR RI	70%	82,33%	117,6%
		• Pileg DPRD Provinsi	70%	82,33%	117,6%
• Pileg DPRD Kabupaten	70%	82,26%	117,5%		
Prosentase partisipasi masyarakat dalam pilkada					
• Pilgub	70%	75,51%	107,8%		
• Pilbup	70%	75,41%	107,7%		

Sasaran Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat, dicapai dengan indikator jumlah kriminalitas dengan capaian kinerja 119%

masuk kategori **Sangat Berhasil**. Indikator prosentase potensi konflik yang dapat diredam dengan capaian kinerja 100% masuk kategori **Berhasil**.

Sedangkan indikator prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu terdiri dari prosentase partisipasi masyarakat dalam pilpres dengan capaian kinerja 118,5% masuk kategori **Sangat Berhasil**, prosentase partisipasi masyarakat dalam Pileg DPD dengan capaian kinerja 117,8% masuk kategori **Sangat Berhasil**, prosentase pileg DPR RI dengan capaian kinerja 117,6% masuk kategori **Sangat Berhasil**, prosentase pileg DPRD Provinsi dengan capaian kinerja 117,6% masuk kategori **Sangat Berhasil**, dan prosentase pileg DPRD Kabupaten dengan capaian kinerja 117,5% masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Capaian kinerja indikator prosentase partisipasi masyarakat dalam pilkada terdiri dari prosentase partisipasi masyarakat dalam pilgub dengan capaian kinerja 107,8% masuk kategori **Sangat Berhasil** dan prosentase partisipasi masyarakat dalam pilbup 107,7% masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
				Th. 2023 (n-1)	Th. 2024 (n)
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Jumlah kriminalitas	260 Kasus	251 Kasus	211 Kasus
		Prosentase potensi konflik yang dapat diredam	100%	100%	100%
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu			
		• Pilpres	70%	-	82,93%
		• Pileg DPD	70%	-	82,47%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
				Th. 2023 (n-1)	Th. 2024 (n)
		<ul style="list-style-type: none"> • Pileg DPR RI 	70%	-	82,33%
		<ul style="list-style-type: none"> • Pileg DPRD Provinsi 	70%	-	82,33%
		<ul style="list-style-type: none"> • Pileg DPRD Kabupaten 	70%	-	82,26%
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pilkada			
		<ul style="list-style-type: none"> • Pilgub 	70%	-	75,51%
		<ul style="list-style-type: none"> • Pilbup 	70%	-	75,41%

Tabel 3.2.3
Perbandingan Realisasi Kinerja
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram masyarakat di	Jumlah Kriminalitas	245 Kasus	211 kasus	114%
		Prosentase potensi konflik yang dapat diredam	100 %	100 %	100 %
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu			
		<ul style="list-style-type: none"> • Pilpres 	78%	82,93%	106,3%
		<ul style="list-style-type: none"> • Pileg DPD 	78%	82,47%	105,7%
		<ul style="list-style-type: none"> • Pileg DPR RI 	78%	82,33%	105,5%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
		• Pileg DPRD Provinsi	78%	82,33%	105,5%
		• Pileg DPRD Kabupaten	78%	82,26%	105,4%
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pilkada			
		• Pilgub	77%	75,51%	98%
		• Pilbup	77%	75,41%	97,9%

1. Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat.

Tahun 2024 target realisasi jumlah kriminalitas yang telah ditargetkan terjadi 265 Kasus, berdasarkan data dari POLRES Ponorogo terealisasi 211 Kasus. Prosentase capaiannya yaitu 119% Kondisi tersebut di peroleh dari upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif yaitu dengan adanya sosialisasi, pembinaan, pemantauan terhadap masyarakat maupun situasi wilayah.

Faktor-faktor penentu keberhasilan sasaran meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Adanya koordinasi dan komunikasi antar tokoh umat beragama melalui FKUB.

Untuk mengembangkan koordinasi dengan Majelis agama, pemuka agama, tokoh masyarakat, ormas keagamaan demi terbangunnya persamaan persepsi dan langkah-langkah sinergitas dalam memelihara dan meningkatkan kerukunan umat beragama, serta terlaksananya deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya konflik dan terpeliharanya kerukunan umat beragama.

Adanya sosialisasi kerukunan umat beragama, musyawarah, diskusi, dialog, penyelesaian masalah di kecamatan dan desa-desa serta terpeliharanya kerukunan umat beragama di semua wilayah.

2. Menjaga agar tidak terjadi gesekan antar perguruan Silat dan Beladiri melalui Pembinaan pengurus maupun anggota forum komunikasi pencak silat dan beladiri (FKPSB) baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.
3. Informasi yang cepat dan akurat untuk dilaporkan ke Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

Permasalahan :

Permasalahan sosial, keagamaan dan etnis serta suku masih tetap menjadi perhatian yang serius mengingat semakin kompleksnya persoalan yang ada dalam keberagaman masyarakat seperti :

- Konflik sosial ekonomi sebagai akibat dari kemajuan teknologi;
- Konflik keagamaan yang disebabkan oleh dinamisasi "aliran" dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan;
- Konflik antar etnis;
- Konflik yang di sebabkan adanya pergesekan antar perguruan Pencak Silat yang ada di Kabupaten Ponorogo;
- Konflik yang di sebabkan adanya perpedaan pilihan dalam selama masa pemilu dan pilkada.

Rencana Tindak Lanjut :

Dari permasalahan diatas maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan tokoh antar umat beragama yang ada di Kabupaten Ponorogo;
2. Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi, dialog, talk show, seminar;
3. Meningkatkan pemahaman warga masyarakat tentang wawasan kebangsaan;
4. Menjaga agar tidak terjadi gesekan antar perguruan Silat dan Beladiri melalui Pembinaan pengurus maupun anggota forum komunikasi pencak silat dan beladiri (FKPSB) baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten;

5. Meningkatkan peran sinergitas Tim Kewaspadaan Dini di Daerah dalam rangka deteksi dini dan cegah dini dalam mengantisipasi timbulnya konflik;
6. Informasi yang cepat dan akurat untuk dilaporkan ke Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA);
7. Sosialisasi kepada masyarakat akan arti penting peran serta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya;
8. Pemasangan baliho / Pamflet yang berisi himbauan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres, Pilkada dan Pileg;
9. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Partai Politik untuk meningkatkan kehadiran pemilih;
10. Membentuk Tim Pemantauan situasi politik.

Rencana Aksi Tahun 2024:

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2024 (Rp.)
1. Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah kriminalitas ▪ Prosentase potensi konflik yang dapat diredam 	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	669.919.300
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	47.947.922.000

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2024 (Rp.)
			Pemantauan Situasi Politik	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	237.750.000
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	33.500.000
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.961.320.0000

B. REALISASI ANGGARAN.

Perincian anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	54.522.106.000	54.486.438.133	99,93
	- Belanja Pegawai	2.966.267.000	2.977.870.708	99,39
	- Belanja Barang dan Jasa	3.339.657.000	3.322.385.425	99,48
	- Belanja Hibah	48.186.182.000	48.186.182.000	100

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.	Belanja Modal	17.400.000	16.825.000	96,70
	- Belanja modal peralatan dan mesin	17.400.000	16.825.000	96,70
	Jumlah	54.539.506.000	54.503.263.133	99,93

Untuk Belanja pada Tahun Anggaran 2024 ini dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp54.539.506.000,00 terdiri dari:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp54.522.106.000,00
- b. Belanja Modal sebesar Rp17.400.000,00

Dapat direalisasikan sebesar Rp54.503.263.133,00 terdiri dari:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp54.486.438.133,00
- b. Belanja Modal sebesar Rp16.825.000,00

Terdapat sisa anggaran Rp36.242.867,00. Alokasi anggaran per sasaran indikator kinerja sesuai dengan Renstra Tahun 2021 - 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Alokasi Per sasaran Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Jumlah Kriminalitas	Rp54.503.263.133,00	99,93%
		Prosentase potensi konflik yang dapat diredam		
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu		
		• Pilpres		
		• Pileg DPD		
		• Pileg DPR RI		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran
		<ul style="list-style-type: none"> Pileg DPRD Provinsi 		
		<ul style="list-style-type: none"> Pileg DPRD Kabupaten 		
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pilkada		
		<ul style="list-style-type: none"> Pilgub 		
		<ul style="list-style-type: none"> Pilbup 		

Besaran anggaran belanja operasi program strategis adalah sebesar Rp54.539.506.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp54.503.263.133,00 atau dengan serapan anggaran sebesar 99,93%. Secara keseluruhan, realisasi anggaran belanja operasi adalah sejumlah Rp54.486.438.133,00 atau dengan serapan anggaran sebesar 99,93%.

Pencapaian kinerja dan anggaran per sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat	1 Jumlah kriminalitas	260 Kasus	211 Kasus	119 %	54.539.506.000	54.503.263.133	99,93%
	2 Prosentase potensi konflik yang dapat diredam	100 %	100 %	100 %			
	3 Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu						
	<ul style="list-style-type: none"> Pilpres 	70%	82,93%	118,5%			
	<ul style="list-style-type: none"> Pileg DPD 	70%	82,47%	117,8%			
	<ul style="list-style-type: none"> Pileg DPR RI 	70%	82,33%	117,6%			
	<ul style="list-style-type: none"> Pileg DPRD Provinsi 	70%	82,33%	117,6%			

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	• Pileg DPRD Kabupaten	70%	82,26%	117,5%			
	4 Prosentase partisipasi masyarakat dalam pilkada						
	• Pilgub	70%	75,51%	107,8%			
	• Pilbup	70%	75,41%	107,7%			

Dari tabel 3.5 diatas maka dapat dihitung tingkat efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	1. Jumlah kriminalitas	119%	99,93%	119%
		2. Prosentase potensi konflik yang dapat diredam	100 %		
		3. Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu			
		• Pilpres	118,5%		
• Pileg DPD	117,8%				
• Pileg DPR RI	117,6%				
• Pileg DPRD Provinsi	117,6%				
• Pileg DPRD Kabupaten	117,5%				
4. Prosentase partisipasi masyarakat dalam pilkada					
• Pilgub	107,8%				
• Pilbup	107,7%				

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam Renstra 2021 – 2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dari hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana;
2. Dari analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja utama pada tahun 2024, 4 (empat) indikator telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu :
 - a) Indikator jumlah kriminalitas terealisasi sebesar 119%
 - b) Indikator prosentase potensi konflik yang dapat diredam mencapai 100%.
 - c) Indikator prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu terdiri dari prosentase partisipasi masyarakat dalam pilpres dengan capaian kinerja 118,5%, prosentase partisipasi masyarakat dalam Pileg DPD dengan capaian kinerja 117,8%, prosentase pileg DPR RI dengan capaian kinerja 117,6%, prosentase pileg DPRD

Provinsi dengan capaian kinerja 117,6% dan prosentase pileg DPRD Kabupaten dengan capaian kinerja 117,5%.

- d) Indikator prosentase partisipasi masyarakat dalam pilkada terdiri dari prosentase partisipasi masyarakat dalam pilgub dengan capaian kinerja 107,8% dan prosentase partisipasi masyarakat dalam pilbup 107,7%.

B. SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran aktif Tim Kewaspadaan Dini di Daerah dalam deteksi dini terjadinya konflik sosial;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kehidupan berpolitik;
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo yang ada dalam rangka pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan SKPD;
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dapatnya ditingkatkan.

Ponorogo, 31 Desember 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Ponorogo



Dra. Bessy Temrisampeang, M.Si.
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP 196805121990092002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSTANSI	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.
VISI	:	Mewujudkan Ponorogo "HEBAT".
MISI	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Aman, Tangkas, dan Responsif.
TUJUAN	:	Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Situasi Lingkungan Daerah yang Kondusif.
TUGAS	:	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.3. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.4. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.6. Pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.7. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatkan rasa aman dan Tentram di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kriminalitas 2. Prosentase potensi konflik Yang dapat di redam 3. Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam pemilu 4. Prosentase Partisipasi masyarakat dalam Pilkada 	<p>Jumlah kriminalitas yang terjadi dikabupaten ponorogo dalam satu tahun</p> <p>$\frac{\text{Jumlah potensi konflik yang dapat diredam}}{\text{Jumlah potensi konflik}} \times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah pemilih yang datang}}{\text{Jumlah Pemilih}} \times 100\%$</p>	<p>Potres Ponorogo</p> <p>Laporan Tim FKDM</p> <p>Rekapitulasi data, laporan pemantauan perkembangan politik daerah</p>	<p>Bidang Kesbang</p> <p>Bidang Sospol</p>



 Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Kabupaten Ponorogo
 Drs. Suko Kartono, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP 196604051986021004

Tujuan dan Sasaran RENSTRA-PD

No	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Tujuan/Sasaran (4)	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke					
				1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	5 (9)	
1.	Meningkatnya peran masyarakat dalam mewujudkan situasi lingkungan daerah yang kondusif.	1.1 Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat	Prosentase kejadian terkait POLEKSOSBUD yang dapat dicegah	100%	100%	100%	100%	100%	
		1.2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam:	- Pilpres	-	-	70 %	-	-
				- Pilleg	-	-	70 %	-	-
				- Pilgub	-	-	70 %	-	-
- Pilbup	-	-	70 %	-	-				

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (3)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1 (4)	Tahun 2 (5)	Tahun 3 (6)	Tahun 4 (7)	Tahun 5 (8)	
			(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	
1.	Prosentase Konflik yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.	Prosentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	75 %	75 %	81 %	82 %	85 %	90 %	
3.	Prosentase Partisipasi Politik Masyarakat	-	-	70%	-	-	75%	
4.	Jumlah Ormas dan LSM yang Aktif	-	22 %	25 %	27 %	28 %	30 %	
5.	Angka Kriminalitas	188 Kasus	265 Kasus	260 Kasus	255 Kasus	250 Kasus	245 Kasus	
6.	Prosentase Potensi Konflik yang dapat Diredam	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Ponorogo HEBAT			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Situasi Lingkungan Daerah yang Kondusif.	Meningkatkan Rasa Aman dan Tenteram di Masyarakat	Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Meningkatkan Koordinasi dengan Forkopimda
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik	Penguatan Kapasitas Parpol dalam Pembangunan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pemilu yang Luber & Jurdil Penguatan Kapasitas Ormas dalam Pembangunan	Meningkatkan kualitas bagi anggota dan kader partai politik dan mewujudkan masyarakat yang demokrasi melalui pendidikan politik Melaksanakan sosialisasi tentang pendidikan etika budaya politik Melaksanakan sosialisasi UU tentang Keormasan

Tabel T.C. 23
Table Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo
Berdasarkan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (3)	Target IKK (4)	Target Indikator Lainnya (5)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Jumlah Sosialisasi Kepada Ormas, Parpol dan LSM	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
		2 Kali				2 Kali						100 %							
2.	Persentase Konflik terkait Keagamaan	0 Konflik				0 Konflik						-							
3.	Persentase Penemuan Terjadinya Konflik Sosial dan Keagamaan	-	-	-		14%						50%				357,14%			
4.	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Ormas/LSM	-	-	-		124					120					96,77%			
5.	Persentase Potensi Kejadian Terkait POLIKSOSBUD yang dapat di cegah	-	-	-		81%					100%					123%			
6.	Angka Kriminalitas	-	-	-		290 Kasus					263 Kasus					100%			

Tabel T.C. 23
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo
Berdasarkan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPE	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Sosialisasi Kepada Ormas, Parpol dan LSM	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Presentase Konflik terkecil Keagamaan	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	-	-	-	-	-
3.	Presentase Penurunan Terjadinya Konflik Sosial dan Keagamaan	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	357,14%	357,14%	357,14%	357,14%	357,14%
4.	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Ormas/LSM	124	124	124	124	124	124	124	120	120	120	120	120	120	96,77%	96,77%	96,77%	96,77%	96,77%
5.	Presentase Potensi Kejadian Terkait POLEKSOSBUD yang dapat di tegah	-	-	-	-	-	-	-	81%	81%	81%	81%	81%	81%	123%	123%	123%	123%	123%

6.	Jumlah Kriminalitas	-	-	-	280 Kasus	270 Kasus	265 Kasus	260 Kasus	255 Kasus	188 Kasus	201 Kasus	251 Kasus	211 Kasus	132%	125%	105%	119%	
7.	Prosentase Potensi Konflik yang dapat diredam	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pilpres	-	-	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	82,93%	-	-	-	110%	
	- Pilreg	-	-	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	82,47%	-	-	-	110%	
	- Pilgub	-	-	-	72%	-	-	70%	-	66,45%	-	-	75,51%	-	-	92,29%	-	
	- Pilbup	-	-	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	75,41%	-	-	-	-	107%



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 6 Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur 63413

Telepon (0352) 483 852, Faksimile (0352) 483 852,

Laman [https:// bakesbangpol.ponorogo.go.id/](https://bakesbangpol.ponorogo.go.id/), Pos-el bakesbangpolponorogo@gmail.com

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Joko Irianto, M.Si.

Jabatan : Pjs. Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Joko Irianto

Ponorogo, 1 Oktober 2024



Pihak Pertama,
Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.,
Penanda TV 1 (r/b)
NIP 196805121990092002

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan rasa aman dan tentram di masyarakat	Jumlah Kriminalitas	260 Kasus
		Prosentase potensi konflik yang dapat diredam	100%
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	70%
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam pilkada	70%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.675.643.300	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 667.419.700	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 47.948.843.000	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 237.750.000	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 33.500.000	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 1.976.350.000	APBD
Jumlah		Rp 54.539.506.000	

Pihak Kedua,


Joko Irianto

Ponorogo, 6 Oktober 2024

Pihak Pertama


Dra. Baiturrahman Tejoatmaja, M.Si.
Perangkat (b)
NIP 196805121090092002

**PENGUKURAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1.	Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan situasi keamanan yang kondusif.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Jumlah kriminalitas Prosentase potensi konflik yang dapat diredam	260 Kasus 100 %	211 Kasus 100 %	119 % 100 %

Ponorejo, 25 Desember 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo



Dra. Bessie Ferry Sampiang, M.Si.
Pembina Pengkaji
NIP. 196605121990092002

**PENGUKURAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi				Capaian
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatnya peran masyarakat dalam mewujudkan situasi keamanan yang kondusif	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Jumlah kriminalitas	260 Kasus	-	-	-	211 Kasus	119%
			Prosentase potensi konflik yang dapat diredam	100%	-	-	-	100%	100%

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kabupaten Ponorogo



Dia ~~Bong~~ Perob Sampiang, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP 196805121990092002